

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali. 2012. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana.
- Agussalim A.G. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ateng Safrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justicia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.
- Basuki Rekso Wibowo, 2021 *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Jakarta : Pustaka Reka Cipta
- Evy Lusya Ekawati, 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Megara Dalam Penanganan Perkara Perdata Sudi Kasus Penyelesaian Tunggakn Listrik Antar Pelanggan Dengan Perusahaan Listrik Negara*, Yogyakarta : Genta Press.
- Isen, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung : Nusa Media.
- sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata dalam Pemahaman Hukum*



*Materiil*. Jakarta : Erlangga.

Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa Cendekia,

Kansil, C.S.T, 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta.

Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti,

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika,

Marwan Effendy. 2005. *Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muh Koesnadi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Nunuk Nuswardani. 2021. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Pustaka Reka Cipta,

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada,

RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2016. *Eksistensi Kejaksanaan dalam Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

Rocky Marbun, dkk. 2012. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Transmedia Pustaka,



..., 2022. *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Mataram : RajaGrafindo Persada.

- Rozali Abdullah, 2016. *Hukum Acar Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:RajaGrafindo Persada,
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, laksana Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta. : Intermasa,
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-2, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

